

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Pekan Ini Disdik Bahas Sekolah Swasta Gratis

Gambir, Warta Kota

Dinas Pendidikan DKI Jakarta bakal membuat seluruh sekolah swasta di Jakarta gratis demi meringankan beban orang tua warga Jakarta.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin mengatakan, pekan ini ia bakal paparkan sekolah swasta gratis ke Komisi E DPRD DKI.

"Kalau di dalam Mahkamah Konstitusi kemarin menyatakan bahwa sekolah gratis ini wajib. Ngambilnya dari mana dananya, ngambilnya dari anggaran 20 persen, itu dulu yang didahulukan. Jadi yang didahulukan sekolah gratisnya dari anggaran 20 persen kalau sekarang di DKI 25 persen," kata Budi, Selasa (20/8/2024).

Jika anggaran 25 persen Dinas Pendidikan DKI mencukupi untuk menyalurkan dana sekolah swasta gratis, maka pihaknya akan

menjalani program pendidikan lainnya.

Misalnya, memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan lainnya supaya anak-anak bisa sekolah dengan layak tanpa memikirkan biaya.

"Kalau itu sudah tercukupi, bisa melakukan program lainnya," jelasnya.

Budi melanjutkan, selama ini dana pendidikan untuk KJP plus saja membutuhkan anggaran sekira Rp 2,3 miliar.

Oleh karena itu, di anggaran tahun depan ia bakal fokus membuat sekolah swasta gratis.

"Kami masih mengkaji apa nanti KJP-KJMU atau KJP saja. Itu tahun ini, kalau enggak salah di APBD-P, 25 persen anggaran dana pendidikan. Kalau dari KJP saja itu sudah Rp 2,3 M," ungkapnya.

Percepat kajian

Sebelumnya, Komisi E DPRD DKI

Jakarta merekomendasikan agar Dinas Pendidikan mempercepat kajian program sekolah swasta gratis.

Rekomendasi ini dibacakan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) Paparan Hasil Pembahasan Komisi-Komisi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Rabu (14/8/2024) malam.

Jhonny meyakini, jika sekolah swasta gratis bisa segera diterapkan maka banyak persoalan pendidikan yang mampu diatasi.

Dia mencontohkan, seperti masalah ijazah tertahan, tak meratanya bantuan sosial (bansos) KJP, hingga putus sekolah karena orang tua tak mampu membayar SPP.

"Komisi E mendorong percepatan pelaksanaan sekolah swasta gratis di DKI

Jakarta," ujar Jhonny dalam forum rapat Banggar DPRD DKI Jakarta.

Selain itu, Komisi E juga merekomendasikan agar Dinas Pendidikan menyiapkan sekolah unggul khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat tak mampu.

Tak hanya menggratiskan biaya sekolah, namun peningkatan mutu dan kualitas sarana prasarana juga perlu ditingkatkan, mengingat kini sudah jaman era digital.

"Komisi E mendorong pengadaan sekolah unggulan bagi orang miskin. Mendorong fasilitas belajar-mengajar dengan menggunakan Smartboard dan pengadaan laptop di sekolah," pungkasnya.

Sementara itu Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov mematangkan persiapan sebelum kebijakan program sekolah swasta gratis

diterapkan. Salah satunya menyatukan sudut pandang seluruh stakeholder dengan harapan tak ada masalah dikemudian hari akibat kebijakan yang saling berbenturan.

"Saya ingatkan, sebelum ini (kebijakan sekolah gratis) diputuskan, dikonsolidasi dulu," ujar Prasetyo dari keterangannya.

Prasetyo mengimbau Dinas Pendidikan agar memperketat dan mengevaluasi sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah gratis. Sebab, ia khawatir ada sekolah yang hanya memanfaatkan program ini, namun tidak benar-benar menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.

"Terutama di sekolah-sekolah swasta ini jangan yang kaleng-kaleng di semua jenjangnya. Sekolah gratis ini harus benar-benar terkoordinir, terkontrol dengan baik," katanya. (faf/m26)